



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104 Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman: <http://www.kemdiktisaintek.go.id>

Nomor : 1568/B2/DT.01.01/2025
Lampiran : 1 dokumen
Hal : Panduan KKN Kebangsaan 2025

10 Juni 2025

Yth.

1. Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Negeri
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d XVII

Dalam rangka menanamkan wawasan kebangsaan dan komitmen kebangsaan, memupuk dan menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air, mempererat kesatuan dan persatuan bangsa, dan melakukan pemberdayaan masyarakat dengan kaidah “silih asih, silih asuh dan silih asah” yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 bersemboyankan Bhineka Tunggal Ika, maka Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui kebijakan Kampus Berdampak, Mahasiswa Berdampak mengadakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan 2025.

Program KKN Kebangsaan ini juga dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didapatnya di perguruan tinggi, menguatkan *hardskills* dan *softskills* secara integratif dan proporsional, mematangkan kepribadian, juga untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan atau cinta tanah air, serta rasa percaya diri dalam menghadapi realitas kehidupan sosial kemasyarakatan, dan menjadi dampak dalam pemberdayaan masyarakat. KKN Kebangsaan dijiwai oleh semangat bergotong royong antar mahasiswa maupun antara mahasiswa dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya guna membantu menyelesaikan permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama surat ini kami sampaikan panduan KKN Kebangsaan 2025. Mohon kepada Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Negeri untuk menjadi panduan dalam pelaksanaan KKN Kebangsaan 2025 dan kepada Kepala LLDIKTI Wilayah I s.d XVII mohon untuk dapat mendistribusikan panduan KKN Kebangsaan 2025 kepada perguruan tinggi di wilayah masing-masing.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Pembelajaran dan
Kemahasiswaan,



Berry Juliandi

NIP 197807232007011001

Tembusan:

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi



Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia



**DIKTISA INTEK
BERDAMPAK**



2025

Panduan KKN Kebangsaan



Panduan Kuliah Kerja Nyata Kebangsaan Tahun 2025

Pengarah

Khairul Munadi

Penanggung Jawab

Berry Juliandi
Sukino

Penyusun

Illah Sailah
Didin Wahidin
Ninuk Purnaningsih
Hasrullah
Miftahush Shirotul Haq
Sukino

Penyunting

Hari Jefri Vernando
Arif Pangaribowo
Andhika Gilang P.
Ninit Aldiana
Amelinda Gamarosa T.
Beben



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya, sehingga buku Panduan KKN Kebangsaan Tahun 2025 telah selesai disusun. Buku ini akan menjadi panduan umum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan KKN Kebangsaan tahun 2025.

KKN Kebangsaan merupakan kegiatan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang dilaksanakan setiap tahun dengan menugaskan salah satu perguruan tinggi sebagai pelaksana/tuan rumah. KKN Kebangsaan merupakan kegiatan dari perwujudan konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi secara utuh terintegrasi. Kegiatan ini memadukan dharma Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam satu kegiatan. KKN Kebangsaan lebih mengedepankan penanaman wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air kepada mahasiswa melalui pengalaman



belajar di masyarakat yang menghubungkan konsep-konsep akademis dengan realita kehidupan. Program ini merefleksikan pengetahuan teori yang disinergikan dengan pengalaman di lapangan yang mampu mematangkan kepribadian mahasiswa dan menumbuhkan rasa percaya diri dalam menjalani kehidupan sosial kemasyarakatan.

Buku panduan ini tidak hanya disusun untuk membantu tim pengembang dan perguruan tinggi pelaksana, tetapi juga bagi mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) peserta KKN Kebangsaan 2025 dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada kegiatan ini. Semoga buku panduan ini dapat menjadi acuan bagi semua pihak dalam rangka mendukung suksesnya seluruh rangkaian kegiatan KKN Kebangsaan tahun 2025. Buku panduan ini tentu masih memiliki kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak akan diperhatikan dan ditindaklanjuti dengan senang hati sesuai ketentuan yang berlaku. Semoga dengan perhatian dan keseriusan kita semua, program ini dapat terlaksana dengan baik dan berhasil guna.

Kepada seluruh pihak yang terlibat, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dedikasi serta kontribusi yang telah diberikan dalam pelaksanaan program ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridai setiap sumbangsih yang telah diberikan demi terwujudnya kehidupan bangsa dan negara yang lebih sejahtera.

**Plt. Direktur Pembelajaran
dan Kemahasiswaan**

Berry Juliandi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN KEBIJAKAN.....	4
C. TUJUAN	4
D. SASARAN DAN MANFAAT	5
BAB II PENYELENGGARAAN KKN KEBANGSAAN	7
A. PENYELENGGARA	7
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	8
BAB III PERSYARATAN	10
A. PERSYARATAN PERGURUAN TINGGI PELAKSANA.....	10
B. PERSYARATAN MAHASISWA PESERTA KKN KEBANGSAAN	10
BAB IV PELAKSANAAN KKN KEBANGSAAN	11
A. PERSIAPAN	11
B. PELAKSANAAN KKN KEBANGSAAN.....	12
BAB V MATERI PEMBELAJARAN KKN KEBANGSAAN	18
A. RANCANGAN PEMBELAJARAN.....	18
B. MONITORING, EVALUASI DAN INDIKATOR KEBERHASILAN.....	22
BAB VI PENUTUP.....	24
LAMPIRAN.....	25
LAMPIRAN 1 FORMAT PROPOSAL PENYELENGGARAAN KKN KEBANGSAAN.....	25
LAMPIRAN 2 FORMAT SURAT PERNYATAAN PERGURUAN TINGGI CALON PELAKSANA	28
LAMPIRAN 3 FORMAT RENCANA KERJA KKN KEBANGSAAN (USULAN MAHASISWA)	29
LAMPIRAN 4 MATRIK RENCANA KEGIATAN KKN KEBANGSAAN	31
LAMPIRAN 5 FORMAT LAPORAN AKHIR KELOMPOK.....	32
LAMPIRAN 6 RUBRIK PENILAIAN KEGIATAN MAHASISWA KKN KEBANGSAAN	34
LAMPIRAN 7 FORMAT PENILAIAN PELAKSANAAN KKN KEBANGSAAN UNTUK DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)	36
LAMPIRAN 8 RUBRIK PENILAIAN PARTISIPASI MASYARAKAT / MITRA KERJA DALAM KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA KEBANGSAAN.....	37
LAMPIRAN 9 SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PERGURUAN TINGGI PELAKSANA KKN KEBANGSAAN	39

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia (lebih dari 280 juta orang), tersebar di lebih dari 17.504 pulau, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7094 kecamatan, 7094 kelurahan, 74957 desa, yang terbentang dari Sabang sampai Merouke, dari Rote sampai Miangas. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang dihiasi keragaman yang luar biasa, ada 1340 suku bangsa, 668 bahasa daerah. Mereka dipersatukan oleh cita-cita luhur yang sama untuk menjadi bangsa yg merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta disatukan oleh tujuan hidup berbangsa dan bernegara yang sama yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bukan hal yang mudah untuk tetap mempersatukan bangsa yang penuh dengan keragaman ini, apalagi saat ini, dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi yang pesat, dunia seolah tanpa sekat, kita telah memasuki era kesejagatan yang di dalamnya keragaman manusia bertambah dengan keragaman baru dari bangsa dan negara lain dari belahan bumi yang lain. Tentu ini membawa persoalan tersendiri bagi Indonesia, kita memasuki era persaingan dan persandingan babak baru yang mengglobal. Batas-batas antar negara baik fisik maupun non fisik (sosial, ideologi, dll) menjadi cair, identitas kita sebagai sebuah bangsa menjadi rentan dan lunak, karena kanal-kanal komunikasi dan informasi dalam format digital menghilangkan batas baku kebangsaan atau kenegaraan yang selama ini ada. Diperlukan berbagai usaha agar fenomena kesejagatan itu kemudian tidak menggerus habis komitmen kebangsaan, melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa, dan melemahkan upaya untuk mencapai tujuan hidup berbangsa dan bernegara yg telah kita bina.

Pemerintah Indonesia saat ini mencanangkan 8 misi pembangunan nasional (ASTA CITA), dengan 17 program prioritas, dan 8 program terbaik cepat untuk melandasi pencapaian Visi Indonesia emas 2045. Visi Indonesia Emas 2045 kita canangkan sebagai batu pijakan untuk mendekatkan kita dalam mencapai tujuan hidup berbangsa dan bernegara seperti yang telah kita canangkan sejak Indonesia memproklamkan kemerdekaan. Untuk itu kita membutuhkan manusia-manusia unggul, yakni manusia Indonesia seutuhnya yang sehat jasmani maupun rohani dengan penguasaan IPTEK mumpuni, berakhlak mulia, cinta tanah air Indonesia, berwawasan global dan memiliki keterampilan abad 21 yang dibutuhkan untuk hidup kini dan masa yang akan datang.

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar untuk mencetak manusia unggul itu melalui berbagai program (kegiatan) yang berbingkai tri dharma perguruan tinggi paradigma baru, yakni paradigma perguruan tinggi berdampak. Perguruan tinggi yang melaksanakan pembelajaran holistik dan bermakna tidak terjebak pada pengajaran yang sekedar menanggung beban berat menghabiskan muatan kurikulum tanpa peduli pada kebermaknaan dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan DUDI, melaksanakan penelitian yang tidak sekedar menghasilkan karya tulis ilmiah tanpa inovasi dan tuna hilirisasi, atau

perguruan tinggi yang tidak sekedar melanggengkan jargon “menara gading” tanpa daya untuk memecahkan permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat.

Di era globalisasi ini, Sebagai pencetak calon pemimpin bangsa masa depan, Perguruan tinggi juga harus berperan untuk menanamkan wawasan kebangsaan dan komitmen kebangsaan, memupuk dan menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air, mempererat kesatuan dan persatuan bangsa, dan melakukan pemberdayaan masyarakat dengan kaidah “silih asih, silih asuh dan silih asah”, sehingga Bangsa Indonesia dapat meraih kemajuan dan mencapai cita-cita luhur dan tujuan bangsanya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 bersemboyan Bhineka Tunggal Ika.

Salah satu program perguruan tinggi yang dimaksudkan untuk membangun komitmen kebangsaan dan memberdayakan masyarakat itu adalah kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan. Bukan sekedar KKN biasa, melainkan KKN yang selain melakukan kegiatan tri dharma perguruan tinggi secara terpadu dalam satu kegiatan, juga mengemban amanah ideal menanamkan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan menumbuhkan kokohnya jaringan persaudaraan antar sesama anak bangsa dari seluruh tanah air, dan menguatkan jembatan penghubung antara perguruan tinggi dengan masyarakat dalam wujud pencerdasan dan pemberdayaan masyarakat, juga tentu menjadi wahana pengamalan konsep pendidikan tinggi berdampak. Melalui KKN Kebangsaan, perguruan tinggi melakukan proses berbagi tanggung jawab melalui kerjasama kemitraan “*quadrihelix*” dengan *stakeholder* lain berupaya secara sinergistik untuk mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh Bangsa Indonesia, dan berkontribusi secara nyata bagi penciptaan kesejahteraan bagi segenap umat manusia di muka bumi melalui pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) seperti yang dicanangkan PBB.

Program KKN-K ini juga dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didapatnya di perguruan tinggi, menguatkan *hardskills* dan *soft skills* secara integratif dan proporsional, mematangkan kepribadian, juga untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan atau cinta tanah air, serta rasa percaya diri dalam menghadapi realitas kehidupan sosial kemasyarakatan, dan turut memberdayakan masyarakat. KKN Kebangsaan dijiwai oleh semangat bergotong royong antar mahasiswa maupun antara mahasiswa dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya guna membantu menyelesaikan permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat.

Kegiatan KKN tidak hanya sekedar aktivitas pengabdian serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah masyarakat saja, akan tetapi dikembangkan sebagai media efektif bagi mahasiswa dalam melakukan proses pembekalan diri baik berupa sikap, keterampilan maupun pengetahuan melalui pemberdayaan masyarakat. Bagi mahasiswa, KKN Kebangsaan juga merupakan wahana pembelajaran ilmu kehidupan di masyarakat untuk melengkapi pembelajaran yang dilakukannya di kelas. Mahasiswa belajar bermasyarakat, belajar dari masyarakat, belajar di masyarakat, belajar bersama masyarakat, belajar membelajarkan masyarakat, dan belajar memberdayakan masyarakat. Oleh sebab itu, rangkaian program KKN disusun secara terencana, terstruktur, bertahap, serta dirancang dan dipersiapkan secara matang oleh mahasiswa bersama masyarakat sasaran, agar mampu melahirkan perubahan-perubahan positif

berkelanjutan dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat oleh mahasiswa dan masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan KKN Kebangsaan memungkinkan tumbuhnya sinergi kemitraan dari berbagai pihak (perguruan tinggi, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan berbagai lembaga profesi maupun organisasi kemasyarakatan) untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat secara kolaboratif integratif dan menyeluruh dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, KKN Kebangsaan juga merupakan kegiatan *education for sustainable development* bagi civitas akademika perguruan tinggi, masyarakat, dan pihak lain yang terlibat. Melalui kegiatan KKN Kebangsaan ini, perguruan tinggi diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan-keterampilan sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing dan kecakapan terukur lainnya (*hardskills*), juga mereka memiliki *softskills* yang diperlukan dalam kehidupan nyata kelak, misalnya tumbuh kembangnya empati, meningkatnya semangat gotong royong, juga kepedulian terhadap permasalahan masyarakat, dan melatih kecakapan kepemimpinan yang unggul serta keterampilan penting lainnya.

Salah satu permasalahan Indonesia sebagai negara yang luas dengan ribuan pulau adalah adanya ketimpangan kemajuan dan kesejahteraan antar wilayah, antara penduduk yang hidup di perkotaan dengan penduduk yang tinggal di pedesaan. Penduduk yang tinggal di perkotaan terkesan lebih maju dengan fasilitas kehidupan melimpah dan lebih sejahtera sementara itu yang tinggal di pedesaan terkesan sebaliknya. Ini menyebabkan terjadinya urbanisasi hingga penduduk yang tinggal di perkotaan terus bertambah dan di pedesaan makin berkurang. Saat ini 58,9% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan sementara sisanya 41,1 % tinggal di pedesaan. Bila tidak ada niat dan langkah nyata untuk melakukan pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan, bukan tidak mungkin desa akan makin ditinggalkan dan perkotaan akan sangat padat dengan permasalahannya akan makin kompleks, makin ruwet. Mungkin dari sisi geopolitik hal ini juga bisa membawa kerawanan bagi keutuhan wilayah NKRI, kokohnya kedaulatan NKRI.

Semangat kolaborasi sinergistik antar perguruan tinggi, maupun antara perguruan tinggi dengan berbagai pihak untuk membangun komitmen kebangsaan dan menguatkan kesatuan dan persatuan bangsa serta turut berupaya memeratakan kemajuan dan kesejahteraan di seluruh wilayah tanah air melalui program pemberdayaan masyarakat pedesaan, maka KKN Kebangsaan dilaksanakan di pedesaan secara rutin dan bergilir oleh perguruan tinggi dengan lokasi berpindah tempat di seluruh tanah air termasuk di wilayah daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T), dan bahkan ke daerah dan wilayah perbatasan negara.

KKN Kebangsaan adalah program Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Pendidikan tinggi Kemendiktisaintek, karena itu maka KKN Kebangsaan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan dapat juga diikuti perguruan tinggi dari negara sahabat sebagai peninjau.

KKN Kebangsaan menjadi program nasional yang dilaksanakan untuk menumbuhkembangkan rasa

cinta tanah air, wawasan, dan jiwa kebangsaan serta patriotisme mahasiswa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KKN Kebangsaan menjadi wadah komunikasi, pertukaran ide serta membangun jejaring awal bagi mahasiswa dari seluruh tanah air dalam mempersiapkan dan mematangkan diri sebagai calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang yang peduli kepada sesama warga bangsanya. KKN Kebangsaan diharapkan juga dapat meningkatkan wawasan kebangsaan mahasiswa melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan mengenali tanah air Indonesia secara utuh menyeluruh di setiap jengkal tanah airnya dan siap mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bangsa dan negara, yang pada gilirannya juga akan berkontribusi bagi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan umat manusia di bumi. Jayalah Bangsaku, Jayalah Indonesiaku.

B. LANDASAN KEBIJAKAN

Landasan Kebijakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
7. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2025;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka; dan
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

C. TUJUAN

Tujuan KKN Kebangsaan adalah:

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara dalam bingkai NKRI;
2. Membangun jejaring mahasiswa dari seluruh tanah air untuk mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika;
3. Melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat (*community development*) dan menumbuhkan motivasi masyarakat di daerah untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa; dan

4. Mengembangkan watak, karakter, *hardskills* dan *softskills* secara proporsional dan integratif, misalnya menumbuhkembangkan jiwa dan nilai-nilai kepemimpinan, bekerjasama, kemandirian, komunikasi, etos kerja, kepedulian dan tanggung jawab, kemampuan memecahkan masalah, keterampilan manajerial, keterampilan administratif.

D. SASARAN DAN MANFAAT

Kegiatan KKN Kebangsaan diarahkan kepada empat sasaran, yaitu pengurus organisasi kemahasiswaan, perwakilan mahasiswa, perguruan tinggi, masyarakat, dan pemerintah daerah.

I. Manfaat bagi mahasiswa adalah:

- a. Meningkatnya wawasan kebangsaan, serta menumbuhkan jiwa nasionalisme dalam semangat persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan mahasiswa tentang empat konsensus dasar hidup berbangsa dan bernegara;
- c. Terbentuknya pola pikir ilmiah mahasiswa dalam setiap menganalisis dan menyelesaikan masalah pragmatis yang ada di masyarakat;
- d. Terbangunnya sikap kepedulian sosial dan rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan hidup masyarakat di daerah;
- e. Meningkatnya keterampilan mahasiswa dalam melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat, pengembangan daerah, dan pembangunan nasional;
- f. Terbentuknya mahasiswa untuk menjadi seorang inovator, motivator, dan *problem solver*, dan
- g. Terbangunnya rasa persaudaraan mahasiswa antar perguruan tinggi melalui jejaring sosial dan kemasyarakatan, untuk kesejahteraan bersama dan keutuhan NKRI.

II. Manfaat bagi perguruan tinggi adalah:

- a. Terbentuknya integrasi dinamis dan perkembangan yang terjadi di masyarakat, ke dalam kurikulum perguruan tinggi guna pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dan berdaya saing, melalui umpan balik dari masyarakat;
- b. Terjalinnya kerja sama yang lebih erat antara perguruan tinggi, instansi pemerintah, masyarakat, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) atau lembaga sosial kemasyarakatan lainnya dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS di masyarakat;
- c. Terbangunnya sinergitas antar perguruan tinggi dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, dalam rangka transformasi IPTEKS kepada masyarakat dan pemerintah;
- d. Terdayagunakannya IPTEKS yang lebih tepat dan bermanfaat dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat; dan
- e. Terbukanya peluang untuk mendiseminasikan dan menerapkan (Hilirisasi) hasil penelitian PT di masyarakat.

III. Manfaat bagi masyarakat adalah:

- a. Terbangunnya kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi wilayah serta memecahkan masalah yang ada di daerahnya;
- b. Terwujudnya kesempatan membentuk kader-kader pembangunan yang kuat dan tangguh melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang digagas bersama-sama masyarakat dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi;
- c. Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat melalui interaksi dengan mahasiswa KKN Kebangsaan dari berbagai daerah yang ditempatkan di lokasi KKN; dan
- d. Meningkatnya literasi IPTEKS masyarakat agar tercipta iklim kondusif bagi berkembangnya inovasi-inovasi bangsa Indonesia.

IV. Manfaat bagi pemerintah daerah adalah:

- a. Diperolehnya sumbangan pemikiran dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan daerah;
- b. Terwujudnya ide kreatif dan inovatif yang diperlukan dalam pemberdayaan dan penguatan kemandirian daerah dengan berbagi pengalaman bersama mahasiswa dari berbagai daerah di seluruh tanah air; dan
- c. Terwujudnya sinergi antar instansi terkait (perguruan tinggi, TNI, Polri, dan lembaga pemerintah) untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PENYELENGGARAAN KKN KEBANGSAAN

A. PENYELENGGARA

KKN Kebangsaan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisainstek) dengan menugaskan perguruan tinggi tertentu untuk melaksanakannya. Perguruan Tinggi Penyelenggara Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan adalah perguruan tinggi yang memenuhi syarat dan ditunjuk oleh Kemdiktisainstek. Struktur penyelenggara KKN Kebangsaan adalah sebagai berikut:

I. Pengelola Pusat

1. Pengarah
 - a. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
 - b. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Penanggung jawab
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Tim Pelaksana
 - a. Tim Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
 - b. Tim Pengembang KKN Kebangsaan

II. Perguruan Tinggi Penyelenggara KKN Kebangsaan

1. Penanggung jawab
Rektor perguruan tinggi penyelenggara KKN Kebangsaan.
2. Pelaksana Program
Panitia pelaksana yang ditunjuk dan ditetapkan oleh rektor perguruan tinggi pelaksana KKN Kebangsaan, termasuk koordinator wilayah (Kabupaten/Kota/Kecamatan).
3. Dosen Pembimbing Lapangan
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) adalah dosen yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor Perguruan Tinggi Pelaksana KKN Kebangsaan.

III. Perguruan Tinggi Peserta KKN Kebangsaan

1. Penanggung jawab
Ketua LPPM (atau unit kerja sejenis) perguruan tinggi peserta KKN Kebangsaan.
2. Dosen Pendamping
Dosen yang ditunjuk oleh pimpinan perguruan tinggi masing-masing untuk membimbing dan mendampingi mahasiswa peserta.

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

I. Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Pusat

1. Mengembangkan Panduan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan;
2. Menunjuk dan menetapkan perguruan tinggi pelaksana melalui seleksi;
3. Menyelenggarakan sosialisasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan;
4. Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan KKN Kebangsaan; dan
5. Memberikan bantuan biaya pelaksanaan KKN Kebangsaan yang bersumber dari APBN.

II. Tugas dan Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Penyelenggara

1. Bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan KKN Kebangsaan;
2. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program KKN Kebangsaan;
3. Melakukan persiapan awal KKN Kebangsaan meliputi: pengembangan kerja sama dengan pemerintah daerah, penentuan tema dan lokasi kegiatan, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi;
4. Melaksanakan sosialisasi KKN Kebangsaan ke semua perguruan tinggi seluruh Indonesia;
5. Melaksanakan pendaftaran peserta sesuai dengan persyaratan dan kuota yang ditetapkan;
6. Membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) KKN Kebangsaan yang meliputi dana bantuan dari kementerian dan dana pendamping dari perguruan tinggi;
7. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya oleh koordinator wilayah (Kabupaten/Kota/Kecamatan);
8. Melaksanakan pembekalan untuk mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) berkoordinasi dengan pengelola pusat;
9. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan KKN Kebangsaan;
10. Melakukan monitoring, evaluasi, dan rekomendasi tindak lanjut kegiatan KKN Kebangsaan;
11. Menyerahkan nilai peserta secara kolektif ke masing-masing perguruan tinggi peserta;
12. Menyusun laporan pertanggungjawaban KKN Kebangsaan (format pada **Lampiran 9**); dan
13. Menyampaikan dan mempresentasikan laporan pertanggungjawaban kegiatan KKN Kebangsaan ke Direktur Belmawa paling lambat satu bulan dari tanggal penutupan.

III. Tugas dan Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Peserta

1. Melakukan seleksi mahasiswa calon peserta KKN Kebangsaan;
2. Menugaskan dosen untuk mendampingi dan membimbing mahasiswa peserta KKN Kebangsaan;
3. Mendaftarkan mahasiswa ke perguruan tinggi penyelenggara KKN Kebangsaan;
4. Memfasilitasi transportasi mahasiswa dari dan ke PT penyelenggara pelaksana KKN Kebangsaan;
5. Memastikan mahasiswa memiliki asuransi kesehatan dan kecelakaan; dan
6. Melakukan rekognisi hasil KKN Kebangsaan dengan sks.

IV. Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Wilayah (Kabupaten/Kota/Kecamatan)

1. Membantu perguruan tinggi pelaksana dalam pengurusan ijin tingkat wilayah dan persiapan implementasi kegiatan KKN Kebangsaan di wilayah yang direncanakan;
2. Melakukan sinergi dan koordinasi kegiatan KKN Kebangsaan dengan pemerintah daerah atau mitra kerja lainnya di wilayah kegiatan KKN Kebangsaan;
3. Mengoordinasikan DPL di wilayah kerjanya;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan KKN Kebangsaan di wilayah kerjanya;
5. Menyusun laporan tertulis mengenai kegiatan beserta analisis dan dampak dari kegiatan KKN Kebangsaan serta memberikan saran untuk keberlanjutan kegiatan di wilayah kerjanya; dan
6. Menyerahkan laporan tertulis kepada panitia pelaksana KKN Kebangsaan.

V. Tugas dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN Kebangsaan

1. Melaksanakan survei ke calon lokasi KKN serta membuat deskripsi lokasi (permasalahan dan potensi);
2. Menyampaikan deskripsi lokasi KKN kepada mahasiswa bimbingannya;
3. Merencanakan proses pembimbingan dan pengarahan mahasiswa selama proses pembekalan dan pelaksanaan KKN;
4. Mendampingi mahasiswa pada saat penempatan, sosialisasi program, pelaksanaan kegiatan, evaluasi kegiatan dan penarikan mahasiswa dari lokasi KKN;
5. Bertindak sebagai pembimbing mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan KKN Kebangsaan dan membantu menjalin kerja sama dengan perangkat desa atau kelurahan, kecamatan, instansi atau dinas, dan masyarakat di lokasi KKN Kebangsaan;
6. Mendorong dan menumbuhkan interaksi positif antar mahasiswa KKN Kebangsaan dan antara mahasiswa KKN Kebangsaan dengan perangkat desa, kecamatan, instansi atau dinas, dan masyarakat;
7. Membantu penyelesaian semua permasalahan yang timbul selama proses pelaksanaan KKN;
8. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa KKN dalam penyusunan program, pembuatan matrik kegiatan, penyusunan laporan akhir (format pada **Lampiran 5**), dan rekapitulasi kegiatan;
9. Melakukan penilaian kegiatan mahasiswa (format penilaian pada **Lampiran 7**) dan kepuasan penerima manfaat (format penilaian pada **Lampiran 8**) dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan KKN Kebangsaan;
10. Melakukan koordinasi dengan koordinator wilayah dalam penyusunan laporan tertulis mengenai kegiatan beserta analisis dan dampak dari kegiatan KKN Kebangsaan serta memberikan saran untuk keberlanjutan kegiatan; dan
11. Merekomendasikan program yang layak ditindaklanjuti oleh perguruan tinggi pelaksana sebagai desa binaan.

BAB III PERSYARATAN

A. PERSYARATAN PERGURUAN TINGGI PELAKSANA

1. Perguruan tinggi yang menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai mata-kuliah wajib untuk program sarjana;
2. Perguruan tinggi yang sudah pernah mengikuti KKN Kebangsaan;
3. Perguruan tinggi yang memiliki kebijakan dan strategi dalam pengembangan kegiatan KKN;
4. Perguruan tinggi yang memiliki jejaring dan kerja sama dengan pemerintah daerah, kelompok masyarakat, mitra kerja lainnya di lokasi KKN Kebangsaan;
5. Perguruan tinggi yang mengajukan proposal dan dinyatakan lolos seleksi perguruan tinggi pelaksana KKN Kebangsaan oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti, format proposal dapat dilihat pada **Lampiran 1**;
6. Perguruan tinggi yang menyatakan bersedia mengalokasikan sejumlah dana tambahan pelaksanaan KKN Kebangsaan sebagai dana pendamping selain dana yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan
7. Perguruan tinggi membuat surat pernyataan akan melaksanakan KKN Kebangsaan yang bebas dari politik praktis sesuai format pada **Lampiran 2**.

B. PERSYARATAN MAHASISWA PESERTA KKN KEBANGSAAN

1. Sehat secara jasmani dan rohani yang ditunjukkan melalui surat keterangan sehat dari dokter;
2. Berkelakuan baik, tidak pernah terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan obat, narkoba, dan kegiatan asusila yang ditunjukkan melalui surat keterangan Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan;
3. Telah menempuh mata kuliah minimal 100 sks dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3.0 pada saat mengajukan permohonan sebagai peserta KKN Kebangsaan yang ditunjukkan dengan transkrip nilai mata kuliah;
4. Pernah dan/atau sedang aktif sebagai pengurus atau anggota pada salah satu organisasi kemahasiswaan di kampus, atau memiliki keterampilan/keahlian khusus dalam pemberdayaan masyarakat, yang ditunjukkan melalui surat keterangan organisasi kemahasiswaan atau Surat Keterangan Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan;
5. Menandatangani surat perjanjian kesediaan ditempatkan di lokasi KKN Kebangsaan yang ditentukan oleh panitia;
6. Memperoleh Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan, sebagai peserta KKN Kebangsaan;
7. Bersedia menaati aturan yang dibuat oleh Panitia Pelaksana KKN Kebangsaan; dan
8. Tidak sedang dalam keadaan hamil.

BAB IV PELAKSANAAN KKN KEBANGSAAN

A. PERSIAPAN

Dalam pelaksanaan KKN Kebangsaan, pemilihan perguruan tinggi pelaksana pada dasarnya dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), mengundang perguruan tinggi di Indonesia untuk mengajukan proposal kesediaan menjadi tuan rumah KKN Kebangsaan. Seleksi dilakukan berdasarkan penilaian terhadap proposal yang diajukan sesuai dengan format berikut:

1. Pendahuluan, berisi sejarah pelaksanaan kegiatan KKN sebelumnya beserta capaian dari KKN yang telah terlaksana;
2. Profil perguruan tinggi yang mengusulkan proposal;
3. Profil daerah calon lokasi KKN Kebangsaan;
4. Menetapkan tema KKN Kebangsaan dan penjabaran dari tema yang diusung;
5. Rencana Kegiatan, yang melingkupi tema utama, tema pendukung, proses pelaksanaan, waktu, total jumlah peserta, jumlah peserta per-lokasi/desa, tindak lanjut kegiatan pasca KKN Kebangsaan, rencana anggaran biaya, dll;
6. Tema dan program yang diusulkan diharapkan mendukung implementasi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's); dan
7. Lampiran surat dukungan dari pemerintah daerah calon lokasi KKN, dan pihak- pihak terkait lainnya.



Gambar 1 Proses Penetapan Perguruan Tinggi Pelaksana KKN Kebangsaan

Proposal yang telah dikirimkan ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan akan dinilai oleh **Tim Pengembang KKN Kebangsaan**. Tim ini mengajukan maksimal tiga proposal terbaik sebagai calon perguruan tinggi pelaksana KKN Kebangsaan. Nominasi tersebut kemudian diundang untuk mempresentasikan proposal secara langsung. Jika diperlukan, dilakukan **visitasi lapangan** ke perguruan

tinggi calon pelaksana oleh Tim Direktorat dan Tim Pengembang untuk verifikasi dan evaluasi lebih lanjut. Rangkaian proses tersebut menjadi dasar penetapan perguruan tinggi pelaksana KKN Kebangsaan oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui Surat Keputusan (SK).

Pada pelaksanaan KKN Kebangsaan Tahun 2025, terdapat kondisi khusus yang memerlukan penyesuaian mekanisme karena terbatasnya waktu persiapan dan koordinasi yang memungkinkan prosedur seleksi terbuka dilakukan seperti biasa. Dengan mempertimbangkan urgensi dan efektivitas pelaksanaan, serta pengalaman dan kesiapan institusional dan dukungan daerah yang telah dimiliki, maka Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menunjuk Universitas Hasanuddin sebagai tuan rumah penyelenggaraan KKN Kebangsaan Tahun 2025. Penunjukan ini dilakukan melalui Surat Keputusan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Skema penunjukan ini bersifat situasional dan tidak menghapus prosedur seleksi reguler sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Mekanisme seleksi terbuka tetap menjadi rujukan pada pelaksanaan KKN Kebangsaan di tahun-tahun berikutnya, sebagai bentuk keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi aktif seluruh perguruan tinggi di Indonesia dalam penguatan wawasan kebangsaan mahasiswa melalui pengabdian masyarakat lintas wilayah.

Tabel 1 Tahapan dan Waktu Penyelenggaraan KKN Kebangsaan 2025

No	Kegiatan	Minggu Pelaksanaan
1.	Penetapan Kabupaten/Kota Mitra & PT Penyelenggara	M2 Mei
2.	Persiapan, Koordinasi, dan Kerja Sama dengan Pihak Terkait	M2 Mei – M4 Juli
3.	Pendaftaran Peserta KKN Kebangsaan	Mei M2 – M3 Juni
4.	Evaluasi dan Penetapan Peserta	M4 Juni
5.	Penunjukan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)	M2 – M4 Juni
6.	Coaching DPL	M1 – M2 Juli
7.	Kedatangan Peserta, Pembekalan Umum & Khusus, dan Pemberangkatan	M3 Juli
8.	Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan	M4 Juli – M4 Agustus
9.	<i>Monitoring</i> Tim KKN Kebangsaan	Selama pelaksanaan
10.	Penarikan Mahasiswa dan Penutupan	M4 Agustus
11.	Penyampaian Nilai ke PT Masing-masing	M1 Oktober
12.	Pelaporan PT Pelaksana ke Dit. Belmawa	M3 November
13.	Presentasi Laporan PT Pelaksana ke Dit. Belmawa	M3 – M24 November

**waktu disesuaikan dengan kondisi yang ada pada panitia penyelenggara KKN Kebangsaan*

B. PELAKSANAAN KKN KEBANGSAAN

I. Waktu Pelaksanaan

Kuliah Kerja Nyata Kebangsaan dilaksanakan setahun sekali pada masa alih semester genap ke semester ganjil, dengan lama waktu pelaksanaan KKN Kebangsaan adalah minimal 30 hari efektif.

1. Peserta KKN Kebangsaan

- a. **Peserta KKN Kebangsaan adalah mahasiswa aktif** yang memenuhi syarat sebagai peserta KKN Kebangsaan dan ditugaskan secara resmi oleh perguruan tinggi asalnya;
- b. Persyaratan calon peserta KKN Kebangsaan 2025, **antara lain:**
 - Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada saat pendaftaran;
 - Memiliki **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00;**
 - **Memiliki pengalaman kepemimpinan**, baik sebagai ketua maupun pengurus aktif dalam organisasi kemahasiswaan tingkat program studi, fakultas, universitas, atau organisasi kemahasiswaan eksternal yang diakui; dan
 - Diutamakan memiliki pengalaman mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau kegiatan sosial lain yang relevan.
- c. Setiap perguruan tinggi mengusulkan mahasiswa peserta terbaik sebagai calon peserta, melalui surat tugas Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan dan disampaikan ke Perguruan Tinggi Penyelenggara KKN Kebangsaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- d. Seluruh mahasiswa peserta KKN Reguler dari perguruan tinggi pelaksana yang berminat, dapat diikuti sebagai peserta KKN Kebangsaan, dengan mempertimbangkan ketersediaan tempat di lokasi KKN Kebangsaan;
- e. Mahasiswa dari perguruan tinggi yang tidak melaksanakan KKN sebagai mata kuliah wajib dan mahasiswa dari perguruan tinggi luar negeri negara serumpun dapat menjadi peserta KKN Kebangsaan dengan status peninjau;
- f. Segala hak dan kewajiban peserta KKN Kebangsaan status peninjau, diatur tersendiri oleh panitia pelaksana KKN Kebangsaan, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan yang berlaku pada Panduan KKN Kebangsaan dan peraturan akademik perguruan tinggi pelaksana KKN Kebangsaan.

2. Perguruan Tinggi Pelaksana

- a. Pemilihan dan penetapan perguruan tinggi pelaksana berdasarkan hasil penilaian proposal dan/atau site-visit oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- b. Penetapan perguruan tinggi pelaksana dilaksanakan melalui rapat Tim Pengembang KKN Kebangsaan bersama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

3. Kepanitiaan

Perguruan tinggi pelaksana KKN Kebangsaan yang telah ditetapkan melalui SK Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, segera membentuk kepanitiaan dengan struktur dan format sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab: Rektor Perguruan Tinggi Pelaksana.
- b. Panitia Pengarah, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota dari unsur Rektor, Wakil Rektor, Tim KKN Kebangsaan, Dekan, Pemda, dll.
- c. Panitia Pelaksana, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris,

Bendahara, dan seksi-seksi sesuai dengan keperluan.

- d. Koordinator Wilayah dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), merupakan dosen yang memiliki semangat dan motivasi mendampingi mahasiswa KKN Kebangsaan di lapangan, dengan pangkat minimal Lektor yang telah mempunyai pengalaman dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pendampingan KKN Reguler yang ditunjuk untuk mendampingi dan membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan KKN Kebangsaan.

4. Penyusunan Kelompok Peserta

Kelompok peserta KKN Kebangsaan meliputi wilayah satu desa dengan jumlah antara 10-20 mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi. Panitia pelaksana menetapkan jumlah mahasiswa per-kelompok dengan berbagai disiplin ilmu yang ada.

5. Pembekalan

Pembekalan dilaksanakan oleh perguruan tinggi pelaksana KKN Kebangsaan sebelum mahasiswa berangkat ke lokasi KKN, dengan materi pembekalan umum dan khusus (d disesuaikan tema KKN Kebangsaan). Pada akhir kegiatan pembekalan, dilaksanakan ujian bagi mahasiswa peserta KKN Kebangsaan oleh Dosen Pembimbing Lapangan tentang topik yang telah disampaikan dalam masa pembekalan.

6. Perencanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan KKN Kebangsaan, seluruh kegiatan harus berorientasi pada:

- a. Penumbuhkembangan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme dan nasionalisme dalam bingkai NKRI;
- b. Pengembangan kepemimpinan (leadership);
- c. Pengembangan nalar dan soft skills mahasiswa;
- d. Pemberdayaan masyarakat (community empowerment); dan
- e. Pengembangan motivasi guna menciptakan kreatifitas dan inovasi masyarakat.

Mengingat waktu pelaksanaan yang singkat, maka hendaknya dihindari kegiatan yang bersifat pembangunan fisik dan perbaikan infrastruktur. Namun, diharapkan mahasiswa KKN Kebangsaan dapat menghasilkan blue print atau perencanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk dilaksanakan oleh aparat desa dan pemerintah daerah serta masyarakat di lokasi kegiatan maupun oleh peserta KKN Reguler di masa yang akan datang. KKN Reguler memiliki jumlah peserta yang lebih banyak dan waktu yang lebih lama.

Untuk itu, kegiatan KKN Kebangsaan dirancang sedemikian rupa agar lebih spesifik pada pengembangan pola pikir masyarakat untuk lebih kreatif dan inovatif guna menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kawasannya menjadi lebih maju berkembang dan berdaya saing (competitive). Kegiatan KKN Kebangsaan dapat dirancang oleh beberapa unsur antara lain:

1. Kegiatan yang dirancang oleh Panitia Pelaksana

Kegiatan yang dirancang oleh Panitia Pelaksana merupakan kegiatan utama yang disusun melalui

kerja sama dan didukung oleh mitra kerja, baik dari berbagai kementerian, pemerintah daerah, dan swasta. Kegiatan ini harus mendukung tema utama dari KKN Kebangsaan dan dapat menjadi kegiatan jangka menengah atau jangka panjang yang berkesinambungan oleh masyarakat.

2. Kegiatan Usulan Mahasiswa

Untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ada di masyarakat serta menyusun suatu rancangan penyelesaian masalah, maka mahasiswa diminta membuat suatu rencana kegiatan strategis jangka pendek yang akan dilaksanakan selama KKN Kebangsaan berlangsung. Rencana kegiatan ini disusun berdasarkan informasi lokasi KKN yang telah disampaikan kepada mahasiswa. Format rencana kerja usulan mahasiswa dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

3. Kegiatan Usulan Masyarakat

Dalam pelaksanaan KKN Kebangsaan, tidak tertutup kemungkinan adanya permintaan atau usulan dari pemerintah setempat atau masyarakat untuk mengadakan kegiatan-kegiatan tertentu. Mahasiswa bersama Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) akan mendiskusikan usulan kegiatan tersebut, dan mempertimbangkan kelayakan untuk dilaksanakan, serta menyusun teknis pelaksanaannya.

Sebelum berangkat menuju lokasi KKN, setiap kelompok mahasiswa dengan bimbingan dan arahan dari DPL akan mendiskusikan rencana kerja kelompok atau desa (lokasi KKN) berdasarkan rencana kegiatan yang telah dirancang panitia pelaksana dan usulan rencana kegiatan dari mahasiswa. Luaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya rencana kegiatan dan matrik rencana kegiatan KKN Kebangsaan untuk setiap kelompok atau desa (**Lampiran 4**).

II. Pelaksanaan KKN Kebangsaan

1. Peserta KKN Kebangsaan diwajibkan hadir di lokasi dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan KKN selama 1 bulan secara terus menerus hingga masa penarikan mahasiswa dari lokasi.
2. Setelah mahasiswa berada di lapangan, maka rencana kerja yang telah disusun oleh setiap kelompok mahasiswa KKN Kebangsaan dan telah disetujui oleh DPL terlebih dahulu harus disosialisasikan kepada masyarakat di lokasi KKN melalui berbagai kegiatan seperti “Lokakarya Desa KKN Kebangsaan”.
3. Dalam lokakarya ini diharapkan adanya masukan dari masyarakat tentang perlu tidaknya suatu kegiatan dilaksanakan serta hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam menjalankan rencana kegiatan yang telah disusun.
4. Peserta diwajibkan dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan kehidupan yang ada di masyarakat dan tidak diperkenankan untuk berperilaku yang bertentangan dengan kebiasaan adat-istiadat setempat, sehingga terjalin hubungan silaturahmi yang baik antara mahasiswa dan masyarakat.
5. Peserta KKN Kebangsaan diharapkan dapat belajar secara langsung di tengah kehidupan masyarakat dan membekali diri dengan pengalaman empiris yang dialaminya selama mengikuti

KKN Kebangsaan.

6. Peserta KKN Kebangsaan diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelajarinya di perguruan tinggi sehingga menjadi bekal menghadapi realita kehidupan setelah menjadi sarjana kelak.
7. Peserta KKN Kebangsaan diharapkan dapat bersinergi dan bekerja sebagai tim yang kompak dengan sesama mahasiswa KKN Kebangsaan lainnya dalam kerja sama yang bersifat multidisipliner dan interdisipliner untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
8. Peserta KKN Kebangsaan diwajibkan selalu berkonsultasi dengan DPL dalam setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat.

III. Penyusunan Laporan Kegiatan dan Luaran lainnya

Laporan kegiatan dimaksudkan sebagai sarana penyampaian informasi tentang pelaksanaan dan capaian kegiatan KKN Kebangsaan serta merupakan laporan pertanggungjawaban atas program kerja yang telah dilakukan. Bentuk laporan terdiri dari tiga jenis:

1. Laporan tertulis yang berisi pelaksanaan KKN disusun secara berkelompok oleh mahasiswa KKN Kebangsaan di satu lokasi/desa, format laporan kegiatan KKN Kebangsaan dapat dilihat pada **Lampiran 9**;
2. Laporan berbentuk video dokumenter yang berisi kegiatan selama KKN Kebangsaan disertai dengan narasi berdurasi 1-3 menit dan diunggah ke media sosial (*Youtube, Instagram, dll*); dan
3. Luaran lainnya antara lain: poster, esai, jurnal, publikasi media massa, dll.

IV. Penilaian

Penilaian terhadap kinerja mahasiswa merupakan gabungan dari nilai-nilai yang dapat dicapai oleh mahasiswa dari setiap tahapan kegiatan. Komponen penilaian akhir KKN Kebangsaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Komponen Penilaian Akhir KKN Kebangsaan

	Ujian Pembekalan	Kehadiran Kuliah Pembekalan	Rencana Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Ujian	Laporan dan <i>Output</i>	Nilai Akhir	Huruf Mutu
Skor	0 – 100	0 – 100	0 – 100	0 – 100	0 – 100	0 – 100	0 – 100	
Persentase	Prasyarat	Prasyarat	10%	50%	15%	25%		

Penilaian ini dilaksanakan oleh DPL dan diserahkan kepada panitia penyelenggara KKN Kebangsaan **maksimal dua pekan** dari tanggal penutupan, untuk kemudian diumumkan ke mahasiswa yang bersangkutan di perguruan tinggi masing-masing. Pembobotan Nilai akhir mata kuliah KKN Kebangsaan dinyatakan pada **Tabel 3** berikut ini:

Tabel 3 Pembobotan Nilai Akhir Mata Kuliah KKN Kebangsaan

Nilai Akhir	Nilai Mutu	Angka Mutu	Sebutan Mutu
$85 \leq NA \leq 100$	A	4,00	Sangat cemerlang
$80 \leq NA < 85$	A-	3,50	Cemerlang
$75 \leq NA < 80$	B+	3,25	Sangat Baik
$70 \leq NA < 75$	B	3,00	Baik
$65 \leq NA < 70$	B-	2,75	Hampir Baik
$60 \leq NA < 65$	C+	2,25	Lebih dari cukup
$55 \leq NA < 60$	C	2,00	Cukup
$50 \leq NA < 55$	C-	1,75	Hampir cukup
$40 \leq NA < 50$	D	1,00	Kurang
$NA < 40$	E	0,00	Gagal

V. Rekognisi sks

Mahasiswa yang mengikuti Program KKN Kebangsaan berhak memperoleh pengakuan sks minimal 4 dan maksimal 6 sks yang rekognisinya diserahkan pada perguruan tinggi masing-masing. Salah satu contoh penghitungan sks yang diberikan kepada mahasiswa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4 Contoh Perhitungan Rekognisi sks

No.	Aktifitas/Sub-Aktifitas	Grup/ Individu	frekuensi	standart (Jam)	LH (jam kegiatan)	Bobot	Equal Credit
	1	2	3	4	5	6	7
A	Kuliah Pembekalan				(3 x 4)		(5/4/16*6)
	1 Dialog Kebangsaan	Individu	6	1	6	1	0,13
	2 Pembekalan Umum	Individu	6	1	6	1	0,13
	3 Pembekalan di Lokasi	Individu	6	1	6	1	0,13
	4 Ujian Pembekalan	Individu	4	1	4	1	0,09
B	Penyusunan Proposal Kegiatan						
	1 Identifikasi Potensi Permasalahan Mitra	individu	10	1	10	1	0,22
	2 Menyusun proposal (idea, writing, review, upload)	Individu	10	1	10	1	0,22
	3 Melakukan pembimbingan penyusunan proposal	Individu	10	1	10	1	0,22
C	Pelaksanaan Kegiatan						
	1 Sosialisasi dan Diskusi dengan Mitra	Individu	10	1	10	1	0,22
	2 Melaksananakan Program KKNT	Grup	117	1	117	0,5	1,30
	3 Monev Dosen Pembimbing, Mitra	Individu	10	1	10	1	0,22
D	Evaluasi, Pelaporan dan Diseminasi Hasil Kegiatan						
	1 Melakukan Evaluasi Kegiatan	individu	10	1	10	1	0,22
	2 Menyusun laporan akhir, artikel jurnal, outout KKNT lainnya (writing, review, review)	Individu	15	1	15	1	0,33
	3 Menyusun bahan presentasi (ppt dan poster)	Grup	15	1	15	0,5	0,17
	4 Menyusun Publikasi Media Massa	Grup	14	1	14	0,5	0,16
	5 Membuat Video Kegiatan	Grup	20	1	20	0,5	0,22
E	Total		263		263		4,00

Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester (sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi) (Pasal 15). Pemenuhan beban belajar dapat berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 16)

BAB V MATERI PEMBELAJARAN KKN KEBANGSAAN

A. RANCANGAN PEMBELAJARAN

Rancangan pembelajaran **KKN Kebangsaan 2025** disusun sejalan dengan semangat dan **visi program Kampus Berdampak**, yaitu menghadirkan perguruan tinggi secara nyata di tengah masyarakat melalui kontribusi strategis, kolaboratif, dan berkelanjutan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan. Dalam kerangka tersebut, KKN Kebangsaan diarahkan untuk menciptakan transformasi sosial, peningkatan kapasitas masyarakat, dan penguatan jejaring antarperguruan tinggi di Indonesia serta dengan berbagai pemangku kepentingan.

Capaian pembelajaran KKN Kebangsaan merupakan internalisasi dan akumulasi dari ilmu pengetahuan, pengalaman empiris, keterampilan, afeksi, dan kompetensi yang telah diperoleh mahasiswa selama proses pendidikan. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEKS) untuk kepentingan masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai-nilai moral, etika, adat istiadat, dan budaya lokal yang hidup di tengah masyarakat.

Penerapan IPTEKS tidak bersifat linier atau tekstual, tetapi perlu melalui proses **penyesuaian, adaptasi terhadap kearifan lokal**, serta pertimbangan konteks sosial dan budaya setempat. Oleh karena itu, pembelajaran KKN Kebangsaan mengusung pendekatan:

- ***Experiential Learning***, di mana mahasiswa mengalami langsung dinamika masyarakat,
- ***Collaborative Learning***, melalui kerja sama lintas keilmuan dan dengan masyarakat,
- ***Project-Based Learning***, dengan merancang dan melaksanakan program nyata berbasis kebutuhan lokal.

Mahasiswa berperan sebagai mitra belajar masyarakat, yang belajar bersama masyarakat dan dari masyarakat, dalam proses menemukan persoalan riil serta merancang dan mengimplementasikan solusi bersama perangkat desa dan pihak terkait, dengan pendampingan dosen pembimbing lapangan (DPL).

Dalam konteks inilah, KKN Kebangsaan tidak hanya menjadi sarana integrasi **tridharma perguruan tinggi** — pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat — tetapi juga sebagai platform utama untuk mewujudkan **kampus yang berdampak**, kampus yang relevan dan berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Sebagaimana ditegaskan dalam amanah Presiden RI pada **Dies Natalis UGM, Februari 1971**, bahwa: “Agar setiap mahasiswa belajar di desa dalam jangka waktu tertentu, tinggal dan bekerja membantu masyarakat pedesaan, memecahkan persoalan pembangunan sebagai bahan dari kurikulumnya”.

KKN Kebangsaan digagas untuk memberi nilai manfaat kepada mahasiswa agar menjadi inspirator dalam menghadapi persoalan di masyarakat, menerapkan teori yang telah didapatkan di perkuliahan, melatih diri menghadapi realitas kehidupan bermasyarakat, membantu pemerintah meluncurkan program-program pembangunan, melakukan perubahan-perubahan sosial ke arah yang lebih baik, dan mempertegas kehadiran kampus di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Atas uraian tersebut, maka capaian pembelajaran KKN Kebangsaan adalah agar mahasiswa:

1. Memiliki wawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan menghargai keanekaragaman;
2. Mampu bekerja sama dalam memformulasi potensi, permasalahan dan solusi melalui penerapan IPTEKS dan inter-profesi;
3. Mampu merancang program kerja dan mengaplikasikannya dengan penuh tanggung jawab;
4. Mampu mengelola perubahan diri dan lingkungan, berkomunikasi, dan memotivasi kelompok dan masyarakat; dan
5. Memiliki kepribadian yang tangguh, jujur, peduli, dan saling menghargai.

Kemampuan akhir yang diharapkan, bahan kajian, bentuk pembelajaran, kriteria penilaian dan bobot nilai KKN Kebangsaan dapat dilihat pada **Tabel 5**.

Tabel 5 Rancangan Pembelajaran KKN Kebangsaan

No.	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi (Bahan Kajian)	Metode & Bentuk Pembelajaran	Indikator Penilaian	Waktu	Bobot (%)
1.	Mahasiswa mampu menjelaskan wawasan kebangsaan	Implementasi wawasan kebangsaan	• Kuliah pembekalan • Dialog interaktif	Mahasiswa mampu menjelaskan nilai dan makna wawasan kebangsaan secara benar dan kontekstual	100'	10
2.	Mahasiswa mampu menjelaskan filosofi KKN Kebangsaan	Filosofi, sejarah, dan tujuan KKN Kebangsaan	• Ceramah • Diskusi kelompok	Mahasiswa mampu menjelaskan filosofi dan latar belakang KKN Kebangsaan dengan tepat	100'	10
3.	Mahasiswa mampu: • Mengidentifikasi potensi dan permasalahan • Merumuskan rencana kerja • Bekerja sama dalam tim	• Potensi dan permasalahan masyarakat • Perencanaan program kerja • Dinamika kelompok	• PBL • SGD • Diskusi dengan mitra	Mahasiswa mampu menyusun rencana kerja berdasarkan hasil identifikasi secara kolaboratif	• Kuliah: 50' • Diskusi Lapangan: • 6 x 50'	10

No.	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi (Bahan Kajian)	Metode & Bentuk Pembelajaran	Indikator Penilaian	Waktu	Bobot (%)
4.	Mahasiswa mampu menjelaskan interaksi sosial dengan masyarakat	Sistem sosial budaya masyarakat lokal	• SDL • Observasi dan praktik interaksi sosial	Mahasiswa mampu menjelaskan pola interaksi dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat	• Kuliah: 50' • Praktik Lapangan: variatif (bagian dari pelaksanaan kegiatan)	10
5.	Mahasiswa mampu: • Bekerja sama dalam tim • Berkolaborasi dengan pihak terkait • Memotivasi/meng edukasi masyarakat • menyusun program yang berdampak nyata di masyarakat secara berkelanjutan	• Kolaborasi multipihak • Peran dan kontribusi mahasiswa dalam KKN Kebangsaan	• PBL • Pelaksanaan langsung di lapangan	Mahasiswa mampu menunjukkan kerja sama, kolaborasi, dan kontribusi edukatif dalam kegiatan nyata	Kuliah: 50' Pelaksanaan Lapangan: variatif (180–270 jam)	40
6.	Mahasiswa mampu mengevaluasi, menyusun laporan dan output KKN	• Evaluasi kegiatan • Penyusunan laporan dan output KKN	• SGD • Penyusunan laporan individu dan kelompok	Laporan dan produk dokumentasi kegiatan disusun dengan baik dan sesuai ketentuan	• Kuliah: 50' • Waktu penulisan dan penyusunan laporan (mandiri)	20

Keterangan

- *PBL: Problem Base Learning*
- *SDL: Self Directed Learning*
- *SGD: Small Group Discussion*

Total Waktu Pembelajaran

- Kuliah & Pembekalan: **7 jam (420 menit)**
- Diskusi/FGD di masyarakat: **6 jam (360 menit)**
- Pelaksanaan kegiatan lapangan: **180–270 jam**
- Penyusunan laporan: **mandiri (tidak dibatasi, dalam masa program)**

Metode pembelajaran KKN Kebangsaan meliputi kuliah pembekalan dan pelaksanaan kegiatan lapangan. Kuliah pembekalan KKN merupakan kuliah tatap muka yang dilaksanakan sebelum mahasiswa berangkat ke lapangan. Materi yang diberikan dalam kuliah pembekalan adalah:

- Materi Umum (Dialog Kebangsaan)**, meliputi wawasan kebangsaan, bhinneka tunggal ika, nasionalisme, pencegahan paham radikalisme, dan penggunaan obat-obatan terlarang serta pengembangan soft skills. Narasumber pembekalan materi umum adalah praktisi, pakar, TNI, Polri, dan/atau tokoh-tokoh nasional. Materi dialog kebangsaan disarankan untuk dilaksanakan di lokasi KKN.
- Materi Khusus**, meliputi filosofi KKN, profil fisik, sosial-ekonomi, sosial budaya, permasalahan, dan potensi yang dapat dikembangkan di lokasi KKN Kebangsaan. Narasumber untuk pembekalan khusus ini adalah Tim KKN Kebangsaan, dosen pembimbing lapangan, mitra dari pemerintah dan swasta. Dalam pelaksanaan pembekalan maupun kegiatan lapangan, pendekatan transdisipliner dan berorientasi pada dampak nyata di masyarakat menjadi bagian penting dari pembelajaran. Hal ini sejalan dengan semangat menjadikan perguruan tinggi sebagai aktor perubahan sosial yang relevan dan berdaya guna bagi masyarakat, sebagaimana tercermin dalam berbagai inisiatif nasional maupun kelembagaan, termasuk program Kampus Berdampak.

Pembekalan juga dilakukan untuk dosen pembimbing lapangan (DPL) sementara itu bagi kepala desa, camat, dan panitia pelaksana diperlukan penyamaan persepsi tentang KKN Kebangsaan. Pelaksanaan kegiatan lapangan KKN Kebangsaan adalah menempatkan mahasiswa di lokasi KKN yang telah ditetapkan untuk melaksanakan rencana kegiatan yang telah disusun pada waktu kuliah pembekalan. Selama pelaksanaan KKN Kebangsaan, mahasiswa akan dibimbing dan didampingi oleh DPL yang telah ditunjuk oleh panitia pelaksana.

DPL merupakan dosen yang memiliki semangat dan motivasi mendampingi mahasiswa KKN Kebangsaan di lapangan, dengan jabatan akademik minimal Lektor yang telah mempunyai pengalaman dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pendampingan KKN Reguler, yang dapat berasal dari **perguruan tinggi pelaksana atau perguruan tinggi lain yang berlokasi di sekitar perguruan tinggi pelaksana, atau bisa berasal dari perguruan tinggi peserta KKN Kebangsaan**. Tujuan dari pembimbingan dan pendampingan ini adalah agar:

1. Mahasiswa memiliki pengetahuan, pemahaman, dan wawasan tentang potensi daerah lokasi KKN, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan agama;
2. Mahasiswa mampu melakukan identifikasi masalah, mengusulkan, dan merancang alternatif

- pemecahan masalah, mengambil keputusan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan;
3. Mahasiswa mampu mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan, kebersamaan, kejujuran, kesetaraan, dan kemandirian; dan
 4. Mahasiswa mampu menguraikan program dalam tahapan kegiatan dan melaksanakannya secara sistematis dalam konteks proses pemberdayaan masyarakat.

B. MONITORING, EVALUASI DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

I. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring merupakan pemantauan, pengumpulan data dan informasi secara sistematis terhadap proses kegiatan yang sedang berlangsung dalam hal perkembangan dan pencapaian hasil, sementara evaluasi adalah penilaian secara sistematis dan objektif terhadap kegiatan yang sedang berjalan atau yang sudah selesai dilaksanakan, mulai dari perancangan, implementasi, dan hasilnya. Monitoring KKN Kebangsaan dilakukan oleh:

1. Tim Pengembang KKN Kebangsaan, meliputi proses dan pelaksanaan KKN Kebangsaan secara keseluruhan,
2. Dosen pembimbing lapangan, meliputi pemantauan terhadap kemungkinan masalah yang dihadapi oleh mahasiswa dan membantu menyelesaikannya, kerja sama dengan mitra, sikap dan tingkah laku, rencana kegiatan, dan pelaksanaannya oleh mahasiswa.
3. Mahasiswa, evaluasi untuk learning outcome KKN Kebangsaan dilaksanakan dengan ujian (tertulis/lisan), survei selama atau pasca kegiatan KKN dengan menggunakan rubrik deskriptif / holistic / perspektif (contoh terlampir) atau focus group discussion (FGD). Rubrik evaluasi KKN Kebangsaan dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

II. Indikator Ketercapaian

Indikator Ketercapaian Tujuan KKN Kebangsaan yang dievaluasi dari mahasiswa peserta

1. Tujuan 1 : Meningkatkan rasa cinta tanah air NKRI
 - a. Mengetahui sejarah negara kita sendiri yang berkaitan dengan lokasi kegiatan
 - b. Melestarikan budaya-budaya yang ada
 - c. Menjaga lingkungan
 - d. Menjaga nama baik negara
2. Tujuan 2 : Membangun jejaring mahasiswa dari seluruh tanah air dengan semangat keberagaman (bhinneka tunggal ika)
 - a. Komunikasi antarpribadi (interpersonal)
 - b. Komunikasi dalam kelompok bermedia (misalnya WA *group*)
 - c. Komunikasi dalam organisasi (kelembagaan baru yang terbentuk setelah kegiatan KKN)
 - d. Komunikasi dan kolaborasi dalam program (multidisiplin sesama mahasiswa; DPL dan panitia; mitra masyarakat desa; mitra masyarakat luar desa, media massa, LSM, *stake holder* lainnya)

3. Tujuan 3 : Mendorong dan memacu kegiatan pembangunan nasional dengan menumbuhkan motivasi masyarakat di daerah untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) yang **berdampak nyata dan berkelanjutan**.

Peran memotivasi atau memfasilitasi, mengedukasi masyarakat: memotivasi masyarakat, memfasilitasi masyarakat, mengedukasi masyarakat, mengadvokasi masyarakat.

4. Tujuan 4 : Mengembangkan watak, karakter, dan *soft skills* melalui penanaman jiwa dan nilai-nilai kebersamaan, kemandirian, etos kerja, dan tanggung jawab, serta kemampuan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.
- a. Peduli dan Empati
 - 1) Memahami permasalahan masyarakat
 - 2) Memahami adat istiadat
 - 3) Diterima dengan baik, mampu beradaptasi di masyarakat
 - 4) Tumbuh sikap peduli dan empati
 - b. Inisiatif program, dan keterlibatan dalam pelaksanaan program (berpikir kritis, dalam memecahkan masalah secara kreatif dan inovatif)
 - 1) Mengusulkan program kerja
 - 2) Menginisiasi program kerja
 - 3) Menjadi PJ minimal 1 program
 - 4) Membantu semua program tim dalam pelaksanaan kegiatan KKN

BAB VI PENUTUP

Demikianlah buku panduan umum ini disusun untuk menjadi panduan bagi semua pihak dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Kebangsaan (KKN) Kebangsaan. Adapun ketentuan-ketentuan lain yang tidak diatur dalam panduan ini, dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan akademik dan aturan-aturan tata-tertib lainnya yang relevan di perguruan tinggi masing-masing.

Untuk kelengkapan panduan ini, maka beberapa petunjuk teknis pelengkap dilampirkan pada bagian lampiran agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda bagi semua pihak yang berkompeten. Semoga buku yang sederhana ini dapat bermanfaat untuk kesuksesan pelaksanaan KKN Kebangsaan bagi semua perguruan tinggi.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 FORMAT PROPOSAL PENYELENGGARAAN KKN KEBANGSAAN

HALAMAN SAMPUL

**PROPOSAL USULAN PENYELENGGARAAN
KULIAH KERJA NYATA KEBANGSAAN**



(Lambang Perguruan Tinggi)

**PERGURUAN TINGGI PENGUSUL
KOTA
TAHUN**

HALAMAN PENGESAHAN

1. PT Pengusul :
2. Unit Pelaksana KKN :
3. Rencana Lokasi KKN :
4. Ketua Tim Penyelenggara :
- a. Nama Lengkap :
- b. Jenis Kelamin : L / P
- c. NIP :
- d. Jabatan struktural :
- e. Jabatan fungsional :
- f. Alamat :
- g. Telepon kantor /Faks :
- h. Telepon genggam/E-mail :
5. Jumlah peserta :
6. Pembiayaan :
- a. Dikti :
- b. PT penyelenggara :
- c. Mitra :
- d. Pemda :
- e. Jumlah Total :

(Kota, Tanggal Bulan dan Tahun)

Menyetujui:
Rektor PT

Ketua
LPM / LPPM / UPT KKN Kebangsaan

Cap dan tanda tangan

Cap dan tanda tangan

Nama Lengkap
NIP

Nama Lengkap
NIP

BAB I. PENDAHULUAN

Deskripsikan latar belakang, tujuan umum dan khusus, urgensi (keutamaan) penyelenggaraan KKN Kebangsaan untuk PT dan masyarakat setempat (maks. 3 halaman).

BAB II. PROFIL PT DAN LOKASI

A. Profil Perguruan Tinggi yang Mengusulkan

Jelaskan sejarah KKN di PT pengusul, apa saja yang telah dilaksanakan untuk program KKN, kemitraan yang telah dilakukan dengan Kementerian dan/atau TNI dan/atau lembaga lain, rencana jangka pendek dan jangka panjang. Telah memiliki panduan pelaksanaan dan evaluasi (penilaian) KKN.

B. Profil lokasi KKN

Jelaskan profil calon lokasi KKN Kebangsaan, kota/kabupaten, kecamatan, desa. Keadaan sosial budaya masyarakat, ekonomi dan fisik, geografis daerah, potensi dan permasalahan.

BAB III. RENCANA KEGIATAN

Jelaskan tema utama atau kegiatan utama yang akan dilaksanakan selama masa KKN, serta tema atau kegiatan tambahan lainnya, luaran fisik dan kompetensi mahasiswa serta mitra kerja sama, dan rencana tindak lanjut pasca KKN.

Proses pelaksanaan KKN Kebangsaan mulai dari persiapan, koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait, kedatangan peserta, pembekalan, pemberangkatan ke lokasi KKN dan seterusnya sampai pelaporan.

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Total Anggaran Biaya yang diusulkan adalah : Rp.....

Kontribusi:

- PT penyelenggara : Rp.....
- Pemerintah daerah : Rp.....
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan : Rp.....
- Mitra kerja sama : Rp.....

LAMPIRAN

- Surat Dukungan dari Pemerintah Daerah calon lokasi KKN, dan pihak-pihak terkait/mitra lainnya
- Rincian Anggaran Biaya

No	Uraian Kegiatan	PT Pengusul (Rp)	Dikti (Rp)	Pemda (Rp)	Mitra (Rp)
1.					
2.					

Catatan: - Rincian biaya pelaksanaan kegiatan dijelaskan pada waktu persentasi

- Uraian kegiatan dapat ditambahkan jika diperlukan

- Dan lain-lain

LAMPIRAN 2 FORMAT SURAT PERNYATAAN PERGURUAN TINGGI CALON PELAKSANA

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : Rektor {Nama PT}

Bahwa sehubungan dengan pengajuan {Nama PT} sebagai perguruan tinggi pelaksana Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan Tahun, kami menyatakan:

1. Siap melaksanakan KKN Kebangsaan Tahun tanpa menggabungkan dengan kegiatan lain atau kegiatan sejenis pada tempat dan waktu yang sama;
2. Siap melaksanakan KKN Kebangsaan Tahun yang bebas dari politik praktis, serta tidak terkait dengan agenda politik;
3. Jumlah **maksimal** mahasiswa yang dikirimkan dari setiap perguruan tinggi peserta adalah mahasiswa; dan
4. Bersedia memberikan dana pendamping pelaksanaan KKN Kebangsaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, Tanggal Bulan Tahun)

Rektor,

Materai, ttd, stempel

Nama lengkap

NIP

LAMPIRAN 3 FORMAT RENCANA KERJA KKN KEBANGSAAN (USULAN MAHASISWA)

**USULAN RENCANA KERJA
KULIAH KERJA NYATA KEBANGSAAN**



(Lambang Perguruan Tinggi)

Oleh:

Nama Mahasiswa

NIM

Fakultas

PERGURUAN TINGGI PENGUSUL

KOTA

TAHUN

1.	Nama Mahasiswa	
2.	Fakultas – Perguruan Tinggi	
3.	Lokasi KKN	Kabupaten : Kecamatan : Desa :
4.	Judul Kegiatan	
5.	Identifikasi, Rumusan Masalah / Potensi	
6.	Metode Pelaksanaan	

Keterangan:

1. Setiap mahasiswa peserta KKN Kebangsaan wajib membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama KKN
2. Format usulan diatas adalah untuk 1 (satu) rencana kegiatan

LAMPIRAN 4 MATRIK RENCANA KEGIATAN KKN KEBANGSAAN

Kabupaten :

Kecamatan :

Desa :

DPL :

No	Program / Kegiatan	Tujuan	Penjab ^{*)}	Waktu
1.				
2.				
3.				
4.				
5.	dst			

^{*)} Penjab adalah mahasiswa yang menjadi penanggungjawab atau koordinator untuk kegiatan tersebut.

Rencana dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Hari ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Dst
1.	Kedatangan di lokasi KKN	x											
2.	Sosialisasi dengan masyarakat		x										
3.	Lokakarya Desa			x									
4.	Kegiatan A				x	x							
5.	Kegiatan B					x							
6.	Kegiatan C						x						
7.	Kegiatan D				x	x							
8.	Kegiatan E						x	x	x				
9.	Kegiatan F									x	x	x	
10.	Dst												

LAMPIRAN 5 FORMAT LAPORAN AKHIR KELOMPOK**LAPORAN AKHIR KELOMPOK
KULIAH KERJA NYATA KEBANGSAAN**

Disusun Oleh: Mahasiswa KKN Kebangsaan

Desa

Kecamatan

Kota / Kabupaten

**DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
(TAHUN)**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
KULIAH KERJA NYATA KEBANGSAAN (TAHUN)**

1.	Lokasi KKN	Desa : Kecamatan : Kabupaten :
2.	Peserta KKN Kebangsaan	1. (Nama Mahasiswa – NIM – Perguruan Tinggi) 2. (Nama Mahasiswa – NIM – Perguruan Tinggi) 3. (Nama Mahasiswa – NIM – Perguruan Tinggi) 4. dst
3.	Dosen Pembimbing Lapangan	
4.	Waktu Pelaksanaan	(tanggal mulai) s/d (tanggal selesai)

(Desa, Tanggal Bulan dan Tahun)

Koordinator / Ketua Kelompok

Tanda tangan

Nama Lengkap

NIP/NIM

Ketua

DPL

Mengetahui:

Kepala Desa

Cap dan tanda tangan

Nama Lengkap

NIP

Tanda tangan

Nama Lengkap

NIP/NIDN

SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. PROFIL LOKASI

(Uraian data demografi desa dan potensinya)

BAB II. RUMUSAN PERMASALAHAN

(Nyatakan permasalahan utama dari desa/lokasi KKN terutama dari sisi SDA dan SDM yang ada)

BAB III. KEGIATAN KKN KEBANGSAAN

(Memuat ringkasan program kerja yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa selama KKN dalam menjawab permasalahan dan pengembangan potensi desa)

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

(Nyatakan permasalahan apa yang telah dapat diselesaikan selama pelaksanaan KKN, kesimpulan dan saran)

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Peta Desa Lokasi KKN
2. Lampiran Foto / dokumentasi kegiatan

LAMPIRAN 6 RUBRIK PENILAIAN KEGIATAN MAHASISWA KKN KEBANGSAAN

Nama Mahasiswa :

Lokasi Kegiatan :

Keterangan: Rubrik penilaian kerja mahasiswa KKN ini diisi oleh Dosen Pembimbing Lapangan KKN, tokoh masyarakat di lokasi KKN dan teman sejawat mahasiswa KKN dengan cara memberikan grade nilai dan komentar terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan

No	Kriteria Penilaian Pelaksanaan KKN	Penilaian				Skor yang Diperoleh	Komentar
		Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4		
1.	Kehadiran harian	<60% dari 30 hari kerja	60 – <80% dari 30 hari kerja	80% – 90% dari 30 hari kerja	>90% – 100% dari 30 hari kerja		
2.	Peduli dan empati	Memiliki 1 dari 4 kriteria	Memiliki 2 dari 4 kriteria	Memiliki 3 dari 4 kriteria	Memenuhi semua kriteria sbb: 1. Memahami permasalahan masyarakat 2. Memahami adat istiadat 3. Memiliki wawasan kebangsaan 4. Diterima dengan baik, mampu beradaptasi di masyarakat		
3.	Komunikasi	Memiliki 1 dari 4 kriteria	Memiliki 2 dari 4 kriteria	Memiliki 3 dari 4 kriteria	Memenuhi semua kriteria berkomunikasi efektif sbb: 1. multidisiplin sesama mahasiswa 2. DPL dan panitia 3. mitra masyarakat desa 4. mitra masyarakat luar desa, media massa, LSM, stakeholder lainnya		

No	Kriteria Penilaian Pelaksanaan KKN	Penilaian				Skor yang Diperoleh	Komentar
		Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4		
4.	Inisiatif program, dan keterlibatan dalam pelaksanaan program (Berpikir kritis, dalam Memecahkan Masalah secara Kreatif dan inovatif)	Memiliki 1 dari 4 kriteria	Memiliki 2 dari 4 kriteria	Memiliki 3 dari 4 kriteria	Memenuhi semua kriteria sbb: 1. Mengusulkan program kerja 2. Menginisiasi program kerja 3. Menjadi PJ minimal 1 program 4. Membantu semua program tim dalam pelaksanaan kegiatan KKNT		
5.	Peran memotivasi, atau memfasilitasi, mengedukasi masyarakat	Memiliki 1 dari 4 kriteria	Memiliki 2 dari 4 kriteria	Memiliki 3 dari 4 kriteria	Memenuhi semua kriteria sbb: 1. Memotivasi masyarakat 2. Memfasilitasi masyarakat 3. Mengedukasi masyarakat 4. Mengadvokasi masyarakat		
6.	Kolaborasi (membangun jejaring kerja sama yang mendukung pelaksanaan program)	Memiliki 1 dari 4 kriteria	Memiliki 2 dari 4 kriteria	Memiliki 3 dari 4 kriteria	Memenuhi semua kriteria berkolaborasi sbb: 1. Multidisiplin sesama mahasiswa 2. DPL dan panitia 3. Mitra masyarakat desa 4. Mitra masyarakat luar desa, media massa, LSM, <i>stakeholder</i> lainnya.		
Total Nilai							

..... 2025

TTD dan cap

(.....)

Ket: Tulis jabatan pemberi tanda tangan di bawah tanda tangan

LAMPIRAN 7 FORMAT PENILAIAN PELAKSANAAN KKN KEBANGSAAN UNTUK DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	UNIVERSITAS
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

Penilaian:

MATERI	NILAI	HASIL PENILAIAN PADA MAHASISWA*)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Kehadiran	1 – 4										
2. Peduli dan empati	1 – 4										
3. Komunikasi	1 – 4										
4. Inisiatif dan pelaksanaan	1 – 4										
5. Peran	1 – 4										
6. Kolaborasi	1 – 4										
Rata-rata Skor	1 – 4										
Nilai Pelaksanaan KKN (Rata-rata Skor x 0,25)	1 – 100										

*) Urutan 1 – 10 sesuai dengan urutan pada tabel nama mahasiswa

..... 2025
Dosen Pembimbing Lapangan

TTD

LAMPIRAN 8 RUBRIK PENILAIAN PARTISIPASI MASYARAKAT / MITRA KERJA DALAM KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA KEBANGSAAN

Nama :

Jabatan :

Institusi :

Lokasi KKN :

Keterangan: Rubrik penilaian ini diisi oleh tokoh masyarakat atau pejabat institusi yang terlibat dalam pelaksanaan KKN (mitra kerja KKN) dengan cara memberikan grade nilai dan komentar terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan

A. Kepuasan dalam Pengembangan Kegiatan KKN

No	Kriteria Penilaian	Grading Kepuasan					Komentar
		Sangat Kurang Puas	Kurang Puas	Cukup	Puas	Sangat puas	
1.	Keterlibatan dan tanggung jawab dalam kegiatan KKN						
2.	Keterlibatan dalam membimbing mahasiswa						
3.	Partisipasi dalam kegiatan KKN						
4.	Keterlibatan dalam refleksi / evaluasi diri mahasiswa dan warga masyarakat						
	Dll.....						

B. Sebutkan Bobot Alasan Kesiediaan untuk Bekerja Sama dengan PT dalam Kegiatan KKN

No	Kriteria Penilaian (alasan)	Grading Alasan			Komentar
		Sangat Penting	Penting	Kurang Penting	
1.	Ingin mencoba model kerja sama baru				
2.	Punya pengalaman positif dg mahasiswa/PT				
3.	Perlu bantuan dalam pelaksanaan program				
4.	Perlu hubungan kerja sama dengan PT				
5.	Insentif dari PT				
6.	Menemukan mitra kerja				
7.	Berpartisipasi dalam pengembangan pembelajaran dan pemberdayaan baik bagi civitas akademika maupun masyarakat				
	Dll.....				

C. Dampak dari Kerja Sama dalam Kegiatan KKN

No	Kriteria Penilaian	Grading			Komentar
		Sangat Nyata	Nyata	Kurang Nyata	
1.	Menghemat anggaran				
2.	Mahasiswa merupakan energi baru				
3.	Meningkatkan profil lembaga kami karena keterlibatan PT				
4.	Kesadaran staf lembaga/warga masyarakat untuk kemajuan dan pembangunan meningkat				
5.	Akses kepada sumber daya PT meningkat				
6.	Fasilitasi kerja sama dengan lembaga lain				
	Dll.....				

..... 2025

Masyarakat

TTD

LAMPIRAN 9 SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PERGURAN TINGGI PELAKSANA KKN KEBANGSAAN

Ringkasan Eksekutif (Maks 10 halaman, full narasi)

I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Kebijakan
- C. Tujuan
- D. Sasaran
- E. Penyelenggara dan OTK

II. Pelaksanaan

- A. Sosialisasi
- B. Profil lokasi pelaksanaan
- C. Pembekalan DPL
- D. Pembukaan KKN Kebangsaan XII
- E. Pembekalan Materi untuk Mahasiswa
- F. Pelaksanaan Program (Ringkasan)
- G. Penutupan KKN Kebangsaan XII
- H. Laporan Keuangan (Garis besar/Narasi)
- I. Mitra Kerja (jumlah, peran/partisipasi, inovasi yang diterapkan, dll)
- J. Output Program dan Pembelajaran

III. Analisis dan Evaluasi (Kuantitatif dan Kualitatif)

- A. Persiapan
- B. Pelaksanaan
- C. Output Kegiatan
- D. Ketercapaian Tujuan (Tujuan Program dan Tujuan Pembelajaran)
- E. Persepsi Manfaat Pelaksanaan Program

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi